

15 Persen Sampah Mengalir ke Laut, Kondisi Pesisir Jateng Memprihatinkan

SEMARANG (IM) - Sampah plastik belum bisa dikelola dengan baik di Jawa Tengah (Jateng). Hal itu membuat kondisi laut di pesisir Jateng kian memprihatinkan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 35,93 juta ton timbulan sampah sepanjang 2022. Dilihat dari provinsinya, sampah terbanyak berasal dari Jateng. Provinsi ini menghasilkan 5,76 juta ton atau 16,03 persen dari total timbulan sampah nasional tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jateng, sebagian sampah yang ada di Jateng juga mengalir ke laut.

Kepala Bagian Pengendalian DLHK Jateng, Nur Hadi mengatakan, pengelolaan sampah masih jadi kendala.

"Kalau yang di pantai data terakhir tahun 2023 kurang lebih 10-15 persen (sampah yang mengalir di

laut)," jelas Nur saat ditemui di Pantai Mangunharjo Semarang, Rabu (5/6).

Untuk itu, dia merasa perlu melibatkan masyarakat untuk mengatasi persoalan sampah yang semakin pelik jika dibiarkan terlalu lama. "Dari komitmen kita bersama dari pengelolaan sampah. Salah satu aspek pengelolaan sampah, salah satunya adalah melibatkan masyarakat," ujar dia.

Menurutnya, masyarakat bisa berkontribusi besar untuk mengurangi sampah. Peran masyarakat juga menjadi salah satu tolak ukur pengelolaan sampah di Jateng.

"Menurut kami keterlibatan masyarakat jadi kontribusi besar karena tolak ukur keberhasilan adalah peran serta masyarakat," paparnya.

Meski demikian, dia tak menampik jika masih banyak kendala soal pengelolaan sampah seperti kurangnya fasilitas dan kesadaran masyarakat.

"Tadi kita lihat, di sepanjang pantai ini juga sampahnya lumayan," ujar Nur. ● **pra**

Pos Pengaduan PPDB DPRD Kota Bogor Dibanjiri Laporan PPDB Tingkat SMA/SMK

BOGOR (IM) - Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, mengungkapkan setelah pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tingkat SMA/SMK dimulai di Kota Bogor, pihaknya mulai menerima aduan secara online atau offline ke komisi IV DPRD Kota Bogor.

Saeful mengungkapkan, aduan yang masuk dari masyarakat terkait dengan sarana prasarana penunjang pada jaringan internet dalam proses pendaftaran PPDB yang dianggap bermasalah.

"Jadi setelah minggu lalu kami membuka posko pengaduan, saat ini sudah banyak aduan yang masuk. Contohnya, server down, website eror dan paling banyak aduan untuk tingkat SMA dan SMK" ungkap pria yang akrab disapa Gus M kepada wartawan, Rabu (5/6).

Gus M membeberkan, bahwa para orang tua murid mengaku selama ini tidak pernah menerima sosialisasi proses PPDB dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sehingga para orang tua ini tidak mengetahui proses dan tahapan yang harus dilalui

bilamana ada kendala dalam proses PPDB.

"Keluhannya, hampir sama yaitu tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh KCD. Harusnya ada seperti yang dilakukan oleh Disdik Kota Bogor kepada Komite sekolah SD beberapa waktu lalu," beber Gus M.

Gus M menjelaskan, tentunya, ini menjadi catatan dan ASB menilai pola komunikasi yang kurang baik yang ditunjukkan oleh KCD Wilayah II Bogor. Karena, menurut ASB untuk pendidikan jenjang SMP pada PPDB tahun 2024 DPRD dan Dinas pendidikan Kota Bogor sudah berusaha semaksimal mungkin mensosialisasikan proses dan tahapan PPDB.

"Hal itu ditunjukkan dengan diadakannya sosialisasi di gedung DPRD Kota Bogor, di mana Disdik Kota Bogor mengundang 208 komite sekolah dasar agar proses sosialisasi bisa berjalan dengan baik. Pihak KCD agar membuka komunikasi dengan seluruh unsur Forkopimda dan stakeholder dunia pendidikan agar proses PPDB tahun ini bisa berjalan lancar," jelasnya. ● **gio**

Pungli di Kab. Bogor Diduga di Jajaran Kepala Sekolah

CIBINONG (IM) - Catatan atau temuan Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Barat pada pengelolaan anggaran di Pemkab Bogor pada Tahun Anggaran 2023 jadi sorotan pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi.

Apalagi, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK-RI Perwakilan Jawa Barat menyebut kerap atau marak terjadi pungutan liar (Pungli) di lingkungan atau jajaran Pemkab Bogor.

Yusfitriadi mengungkapkan dirinya menerima informasi bahwa para pejabat yang bakal dipanggil oleh Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu didominasi oleh para kepala sekolah (Kepsek).

Yusfitriadi pun merasa tak heran akan adanya Pungli, terutama di sekolah negeri atau dalam hal ini di jenjang Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Tak heran kalau ada Pungli di lingkungan SD maupun SMP Negeri, baik itu terkait Penerimaan Pendaftaran Didik Baru (PPDB), uang pembangunan pagar, uang study tour, cinderamata guru dan lainnya hingga wajar kalau BPK-RI menemukan indikasi Pungli tersebut," katanya kepada wartawan, Rabu (5/6).

Ia menuturkan bahwa penindakan atas dugaan

Pungli berupa pemanggilan para Kepsek dan selanjutnya diberikan sanksi apabila sudah terkonfirmasi, merupakan tindakan yang lambat.

"Kenapa harus menunggu jadi temuan BPK-RI lalu ditindak, dan tidak ada antisipasi sebelumnya oleh Bupati Bogor. Kenapa Pemkab Bogor atau dalam hal ini Dinas Pendidikan tidak melakukan sosialisasi terkait apa itu Pungli, Dinas Pendidikan harus menjelaskan manfaat dan penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah dan orang tua murid hingga kesempatan terjadinya Pungli menjadi sangat kecil," tutur Yusfitriadi.

Diwawancarai terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Rusliandy mengaku bersama Inspektorat akan mendalami peran terduga pelaku Pungli. Jajarannya pun, siap melaksanakan sanksi yang diberikan oleh Inspektorat, Majelis Pertimbangan atau Ketua Timnya yaitu Penjabat Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

"Kalau terbukti ada pelanggaran pasti bakal ada pemberian sanksi baik ringan maupun berat. Kami tak mau berasumsi, walaupun dugaan Pungli tersebut masuk ke dalam LHP BPK-RI Perwakilan Jawa Barat," tukas Rusliandy. ● **gio**

8 | Nusantara



KUOTA PPDB 2024 DI JAWA BARAT

Orang tua bersama calon siswa baru melakukan pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di SMK Negeri 8, Bandung, Jabar, Rabu (5/6). Dinas Pendidikan Jabar mencatat, kuota PPDB di Jabar untuk Tahun 2024 mencapai 300 ribu dan diprediksi bertambahnya kuota PPDB 2024 menembus 100 persen.

BKPSDM Kab. Bogor Berharap Kuota Tambahan P3K Disetujui

Jika formasi tambahan P3K ini disetujui oleh KemenPAN-RB, maka jumlah tenaga guru atau pegawai honorer, tersisa 3.000 orang lagi. Ke-3.000 orang tenaga guru atau pegawai honorer ini akan jadi pekerjaan rumah kami selanjutnya, untuk nantinya diangkat menjadi P3K, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Rusliandy.

CIBINONG (IM) - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Rusliandy

berharap Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyetujui usulan tambahan Pemkab

Bogor terkait permohonan penambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Seperti diketahui sebelumnya, bahwa Pemkab Bogor total mengajukan pengangkatan 4.000 orang tenaga guru atau pegawai honorer menjadi P3K, dan baru disetujui 2.335 orang.

Mereka pun langsung memohon kembali atau tambahan formasi P3K sebanyak 1.700 orang, agar 4.000 orang tenaga guru atau pegawai honorer diangkat menjadi P3K karena ada permintaan Forum Guru Honorer Negeri (FGHN) Kabupaten Bogor Esa Saputra agar 2.303 anggotanya diangkat menjadi

P3K dan bukannya hanya 800 orang saja.

"Kami berharap KemenPAN-RB menyetujui usulan tambahan yang sebelumnya hanya 2.335 P3K menjadi 4.000 P3K, karena ada permintaan tambahan kuota formasi dari para guru honorer," ujar Rusliandy kepada wartawan, Rabu (5/6).

Rusliandy menuturkan tambahan kuota formasi P3K tidak hanya untuk para tenaga guru honorer, tetapi juga untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya.

"Terkait siapa tenaga honorer yang diterima dan diangkat menjadi P3K itu kewenangan KemenPAN-RB, bisa test atau nanti

langsung diangkat menjadi P3K," tuturnya.

Mantan Camat Cibinong ini menjelaskan bahwa gaji maupun tunjangan para P3K ini diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), melalui dana perimbangan atau Dana Alokasi Umum (DAU).

Ia melanjutkan jika formasi tambahan P3K ini disetujui oleh KemenPAN-RB, maka jumlah tenaga guru atau pegawai honorer, tersisa 3.000 orang lagi.

"3.000 orang tenaga guru atau pegawai honorer jadi pekerjaan rumah kami selanjutnya, untuk nantinya diangkat menjadi P3K," lanjut Rusliandy. ● **gio**

Setjen DPR RI Gali Informasi, Data, dan Fakta ke Diskominfo Kabupaten Bogor

CIBINONG (IM) - Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Selasa (4/6). Kunjungan tersebut dalam rangka menggali informasi, data, dan fakta dalam rangka menyusun naskah akademik undang-undang rahasia negara.

Rombongan Sekretariat Jenderal DPR RI dipimpin oleh Analis Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RI, Budiman, dan diterima oleh Sekretaris Diskominfo, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi, Kepala Bidang Aplikasi Informatika, beserta jajaran Diskominfo Kabu-



Setjen DPR RI dalam pertemuan untuk menggali informasi, data, fakta ke Diskominfo Kabupaten Bogor.

paten Bogor. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Linda Hendrayani menyambut baik kedatangan

Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka menggali data, informasi, fakta-fakta terkait dengan tugas pokok Diskominfo yang relevan dengan penyusunan naskah

akademik rancangan undang-undang rahasia negara. "Semoga data, informasi, fakta-fakta yang didapat bisa bermanfaat dalam rangka penyusunan naskah akademik

rancangan undang-undang rahasia negara. Dan semoga pertemuan ini dapat membangun sinergi dan kolaborasi ke depan," kata Linda.

Hal ini guna memberikan harapan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) agar dapat mendistribusikan SDM yang kompeten di semua wilayah kabupaten/kota.

"Ini penting karena era pemerintahan digital ke depan memerlukan SDM yang berkompeten di bidang digital, khususnya kompetensi sandiman," tambah Ahmad.

Dia berharap apa yang diperoleh di Kabupaten Bogor dapat disintesis dengan berbagai data yang didapat dari daerah lain. Nantinya akan memperkaya aspek substansi di dalam naskah akademik dalam rangka menyusun undang-undang rahasia negara ke depan. ● **gio**

Pemkab Bogor Edukasi Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi



Pemkab Bogor edukasi penanganan bencana kekeringan, bencana alam dan hidrometeorologi.

CIBINONG (IM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD), melakukan sosialisasi bencana alam hidrometeorologi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan penanga-

nan bencana kekeringan, yang berlangsung di Kantor BPBD Kabupaten Bogor, Selasa (4/6). Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Bogor, Ade Hasrat mengatakan, mitigasi bencana kekeringan di Kabupaten Bogor dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemasok air setempat untuk mengembangkan rencana konservasi air, melalui penggunaan sumur resapan, memperhatikan penggunaan lahan pribadi dengan mempertimbangkan konservasi air.

Lalu, melakukan perencanaan dan pengelolaan penyimpanan air di dalam wadah besar untuk penyimpanan dalam jangka waktu lama.

Menampung air hujan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, memastikan kebersihan air yang ditampung atau disimpan, serta membudayakan penanaman sayur dan buah yang tahan cuaca kemarau. Serta melakukan konsep TRAP (Tampung, Resapkan, Alirkan dan Pelihara).

Juga untuk menjaga dan

mengelola sumber air bersih dan tempat penampungan air waduk, embung dan lainnya.

Datangnya bencana tidak bisa diprediksi dan diduga, untuk itu perlu mitigasi bencana yang baik agar setidaknya bisa mengurangi resiko bencana. Tentunya melalui sosialisasi dan edukasi ini jadi satu keharusan untuk mengedukasi, mengingatkan, meskipun Bogor kota hujan tapi ancaman kekeringan pasti ada," beber Ade Hasrat.

Camat Jonggol, Andri Rahman mengatakan, wilayah Jonggol merupakan salah satu wilayah yang dengan potensi bencana alam kekeringan melalui kegiatan sosialisasi bencana alam hidrometeorologi.

Tentunya bisa meningkatkan pemahaman dan memperkuat jajarannya Pemerintah Kecamatan Jonggol dalam melakukan mitigasi bencana jika terjadi kekeringan. ● **gio**